

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KECAMATAN  
ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ITA FAUZIA SEPTIANA**

**NPM 2016041041**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU**

**Oleh**

**Ita Fauzia Septiana**

Sektor pertanian merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Salah satu kebijakan penting yang diambil adalah Program Kartu Petani Berjaya (KPB) di Provinsi Lampung, yang bertujuan memberikan kemudahan akses bagi petani terhadap pupuk bersubsidi, beasiswa, permodalan, serta teknologi pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi program Kartu Petani Berjaya dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, dengan menganalisis perilaku organisasi, implementor, dan kelompok sasaran. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memaparkan proses implementasi secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kartu Petani Berjaya belum optimal. Meskipun ada komitmen dan koordinasi yang baik antara Dinas Pertanian dan kelompok tani, kendala seperti kurangnya sosialisasi dan kesiapan penyuluh pertanian, serta respon beragam dari kelompok tani, menghambat pelaksanaan program ini. Kelompok tani merasa sistem digitalisasi masih sulit diadopsi, dan beberapa petani serta pemilik kios pupuk menyatakan bahwa manfaat program belum sepenuhnya dirasakan. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pusat serta peningkatan kapasitas penyuluh di lapangan menjadi kunci untuk keberhasilan program ini.

**Kata Kunci:** Implementasi Program, Kartu Petani Berjaya, Pupuk Bersubsidi, Kesejahteraan Petani

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF THE FARMERS CARD PROGRAM WAS SUCCESSFUL IN IMPROVING THE WELFARE OF FARMERS IN ADILUWIH DISTRICT PRINGSEWU DISTRICT**

**By**

**Ita Fauzia Septiana**

*The agricultural sector is an important pillar in the Indonesian economy, especially to improve food security and farmer welfare. One of the important policies taken is the Successful Farmer Card (KPB) Program in Lampung Province, which aims to provide easy access for farmers to subsidized fertilizers, scholarship, capital, and agricultural technology. This study aims to describe the implementation of the KPB program in improving farmer welfare in Adiluwih District, Pringsewu Regency, by analyzing the behavior of organizations, implementers, and target groups. The method used is qualitative research with a descriptive approach to systematically explain the implementation process. The results of the study indicate that the implementation of the Successful Farmer Card has not been optimal. Although there is good commitment and coordination between the Agriculture Service and farmer groups, obstacles such as lack of socialization and readiness of agricultural extension workers, as well as mixed responses from farmer groups, hamper the implementation of this program. Farmer groups feel that the digitalization system is still difficult to adopt, and several farmers and fertilizer kiosk owners stated that the benefits of the program have not been fully felt. Better coordination between local and central governments and increasing the capacity of extension workers in the field are key to the success of this program.*

*Keywords: Program Implementation, Successful Farmer Card, Subsidized Fertilizer, Farmer Welfare*

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KECAMATAN  
ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU**

**Oleh**

**ITA FAUZIA SEPTIANA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **Implementasi Program Kartu Petani Berjaya  
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di  
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu**

Nama Mahasiswa : **Ita Fauzia Septiana**

No Pokok Mahasiswa : **2016041041**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

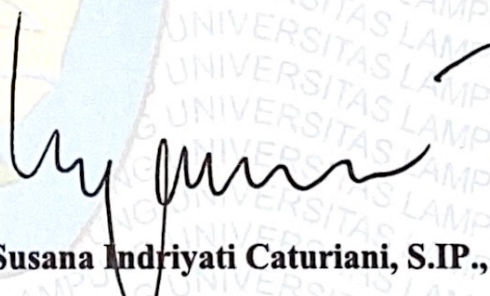
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

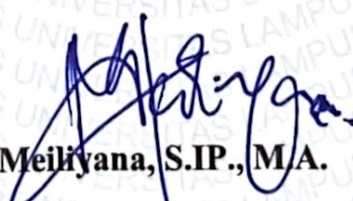
  
**Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si**

NIP. 196911032001121002

  
**Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si**

NIP. 197009142006042001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

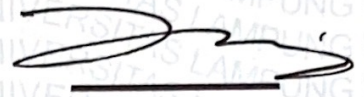
  
**Meilhyana, S.IP., M.A.**

NIP. 197405202001122002

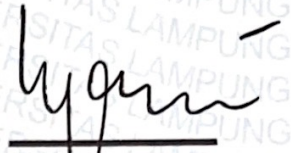
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

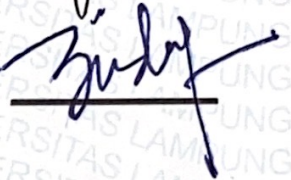
**Ketua : Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si**



**Sekretaris : Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si**



**Penguji : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si**

**NIP. 196108071987032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 September 2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Bandar Lampung, 17 September 2024

Yang Menyatakan,



Ita Fauzia Septiana

NPM 2016041041

## RIWAYAT HIDUP



Ita Fauzia Septiana, lahir di Enggal Rejo pada bulan September sebagai anak ketiga dari tiga saudara, dari pasangan Bapak Samsu Huda dan Ibu Dasyati. Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di MI Sabiluttaufiq tahun 2009-2014, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs Negeri 1 Pringsewu tahun 2014-2017, selanjutnya di SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun 2017-2020, dan di tahun 2020 melanjutkan Pendidikan di Universitas Lampung program studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur SBMPTN.

Selama menempuh Pendidikan di Universitas Lampung, penulis mengikuti organisasi tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan, yaitu BEM U KBM UNILA, UKM Basket UNILA, FSPI FISIP UNILA, dan HIMAGARA. Pada tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Mulang Maya, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Setelahnya, penulis mengikuti Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yaitu Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung, pada bulan Februari hingga Agustus 2023.



## **MOTTO**

“Hidup itu hanya sementara, mubazir jika isinya hanya mengeluh saja”

(Ita Fauzia Septiana)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Setiap orang memiliki proses yang berbeda, percaya proses itu yang paling penting karena ALLAH SWT telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Edwar Satria)

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Segala puji bagi Allah SWT. Dzat yang Maha Sempurna.  
Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah  
Rasulullah Muhammad SAW*

*Dengan ketulusan hati dan rasa sayang yang tiada henti,  
Ku persembahkan karyaku ini sebagai tanda cinta,  
kasih sayang, dan terima kasihku kepada:*

*Ayahku Samsu Huda dan Ibuku Dasyati tercinta,  
yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang  
dengan seluruh pengorbanan yang tulus, tanpa lelah selalu mendokan dan  
melakukan semua yang terbaik untuk keberhasilan dan kebahagiaanmu*

*Saudari ku tersayang  
Kakak perempuanmu Nevi Izazaya dan Nila Umailatul Fitri  
yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta selalu membantu  
menyelesaikan masalah apapun yang aku hadapi*

*Keponakan ku tercinta  
Adiyatma Alby Alfaiz, Zyan Attaki Khaizuran, dan Alkhalif Ahmed Maindra  
yang sudah lahir ditengah-tengah keluarga kami sehingga menambah semangat  
untuk menyelesaikan skripsi*

*Para pendidik yang telah mengajar dengan penuh kesabaran  
Almamater Universitas Lampung tercinta*

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Kartu Petani Berjaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus ikhlas kepada:

1. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si, selaku dosen pembimbing utama penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih atas seluruh saran dan ilmu yang Prof berikan kepada penulis, selalu mengingatkan dalam setiap progres penulisan skripsi, terimakasih selalu sabar ketika memberikan arahan dan bersedia untuk membimbing penulis sampai akhir. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu melimpahi Prof Noverman.
2. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si, selaku dosen pembimbing pendamping penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih atas seluruh saran dan masukan yang Bapak berikan kepada penulis dan terimakasih juga karena ibu selalu sabar ketika mengarahkan penulis mengenai penelitian yang di lakukan. Semoga Ibu Indri selalu dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan.
3. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P, selaku dosen penguji skripsi penulis dan selaku dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih atas seluruh saran dan masukan yang bapak berikan kepada penulis sejak seminar proposal hingga skripsi ini selesai dan terimakasih untuk seluruh ilmu yang sudah berikan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen maupun staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas ilmu dan nasihat selama proses perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Samsu Huda dan Ibu Dasyati yang selalu tulus mendoakan, dan memberikan dukungan baik secara moril maupun material, juga memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua kakak tersayang, Nevi Izazaya dan Nila Umailatul Fitri yang rajin menanyakan progress skripsi yang membuat penulis semakin bersemangat untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk ketiga ponakanku yang lucu imuy dan menggemaskan, Alby, Zyan, dan Alkha terimakasih telah lahir kedunia ini yang membuat kondisi rumah semakin ramai dan hangat.
11. Kepada teman-teman “Kebanggaan Mama Papa”, mba kiki, mba nurma, mba titin, kak lel, mba nadia, diki, dan pena, terimakasih sudah menjadi tempat penghibur dikala penat pikiran dan penghilang stres.
12. Teman-teman “Bawaslu Pride” fefe, depi, pani, manda, pirdi, terimakasih udah support penulis saat proses magang hingga skripsi ini selesai, woupyuu.
13. Kepada sahabatku tya, terimakasih sudah menemani penulis saat proses skripsi dan segala bentuk bantuan kecil hingga besar yang membuat skripsi ini dapat selesai.
14. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

Bandar Lampung, 17 September 2024  
Penulis,

Ita Fauzia Septiana

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	12
2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik .....	13
2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan .....	13
2.3.2 Proses Implementasi Kebijakan Publik .....	14
2.3.3 Program.....	15
2.3.4 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.4 Tinjauan Tentang Kartu Petani Berjaya (KPB) .....	20
2.4.1 Definisi Kartu Petani Berjaya (KPB).....	22
2.4.2 Kepesertaan Anggota Program Kartu Petani Berjaya (KPB) .....	23
2.4.3 Tujuan Program Kartu Petani Berjaya (KPB) .....	24
2.4.4 Cara Mendaftar Menjadi Anggota e-KPB .....	25
2.4.5 Proses Transaksi Pupuk Subsidi pada <i>Website</i> Kartu Petani Berjaya Melalui Akun Kelompok Tani (Poktan).....	26
2.5 Kerangka Pikir .....	27
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Tipe dan Jenis.....	29

3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Lokasi Penelitian.....	32
3.4 Sumber Data .....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.6 Teknik Analisis Data .....	36
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	38
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Adiluwih.....	41
4.1.2 Kondisi Demografi di Kecamatan Adiluwih .....	42
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	47
4.2.1 Pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Adiluwih .....	48
<b>V. KESIMPULAN.....</b>	<b>101</b>
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran .....	102

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Tim E-KPB Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pringsewu.....	5
Tabel 2. Jumlah Kelompok Tani dan Anggota di Kecamatan Adiluwih.....	6
Tabel 3. Luas Panen Jagung Menurut Kecamatan (ha), 2023.....	8
Tabel 4. Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 5. Daftar Informan.....	34
Tabel 6. Data Dokumen Penelitian .....	36
Tabel 7. Jumlah Penduduk Kecamatan Adiluwih Berdasarkan Jenis Kelamin ....	42
Tabel 8. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Adiluwih 2021 .....	43
Tabel 9. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Adiluwih .....	44
Tabel 10. Jumlah Usaha Tani Perorangan Menurut Kecamatan dan Subsektor ...	45
Tabel 11. Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah .....	45
Tabel 12. Luas Lahan Kering, 2020 (Ha) .....	46
Tabel 13. Data Kelompok Tani Kecamatan Adiluwih.....	47
Tabel 14. Data Penebusan Pupuk Subsidi di E-KPB 2023 .....	57
Tabel 15. Target Pelaksanaan KPB.....	58
Tabel 16. RDKK Pupuk Bersubsidi Tahun 2024 Kecamatan Adiluwih Komoditas Jagung.....	59
Tabel 17. Penjabaran APBD Pada Program Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2023 .....	60
Tabel 18. Nama Penerima Beasiswa E-KPB dari Kabupaten Pringsewu.....	71
Tabel 19. SOP Penyuluhan Program KPB.....	82
Tabel 20. Jumlah PPL Kecamatan Adiluwih.....	86
Tabel 21. Jumlah Ideal Banyaknya PPL Kecamatan Adiluwih.....	87

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Model Sistem Program Kartu Petani Berjaya .....	3
Gambar 2. Model Implementasi Terpadu ( <i>Integrated</i> ) .....	18
Gambar 3. Janji Kerja Gubernur Lampung .....	21
Gambar 4. Beranda Elektronik Kartu Petani Berjaya Provinsi Lampung .....	23
Gambar 5. Bagan Registrasi Anggota E-KPB .....	26
Gambar 6. Kerangka Pikir.....	28
Gambar 7. Model Implementasi Terpadu .....	30
Gambar 8. Komponen dalam Analisis Data ( <i>Interactive Model</i> ) .....	37
Gambar 9. Peta Kecamatan Adiluwih.....	41
Gambar 10. Sosialisasi KPB oleh Sekretariat e-KPB di Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu.....	51
Gambar 11. Poster KPB Award 2022 .....	53
Gambar 12. Poster e-KPB Award 2023 .....	55
Gambar 13. Penyerahan Penghargaan untuk Kabupaten Pringsewu .....	56
Gambar 14. Pemetaan Hubungan Antar Organisasi .....	63
Gambar 15. Kios Pupuk di Kecamatan Adiluwih.....	65
Gambar 16. Poster Beasiswa KPB 2023 .....	70
Gambar 17. Rapat Kordinasi Kerjasama dengan Jasindo .....	72
Gambar 18. Sosialisasi KPB oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu di Adiluwih, 2022.....	79
Gambar 19. Sosialisasi KPB di BPP Kecamatan Adiluwih.....	84
Gambar 20. Layanan Poktan .....	91
Gambar 21. Layanan untuk Petani .....	93



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian menjadi basis perekonomian dalam meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Pembangunan pertanian bertujuan untuk menyejahterakan petani melalui subsidi input usaha tani berupa pupuk dan benih, maupun penerapan teknologi baru sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian. Pembangunan pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan nasional. Hal ini karena sumber daya alam Indonesia yang beragam, sebagian besar penduduk bergantung pada hasil alam, porsi pendapatan ekspor pertanian yang besar, dan tingginya penyerapan tenaga kerja. Vitalnya sektor ini, menjadikan petani harus mendapat perhatian lebih karena perannya dalam menggerakkan sektor pertanian. Namun, nyatanya hingga saat ini sebagian besar petani di Indonesia masih tergolong miskin (Yusup Nugraha, 2022). Sehingga, perlu intervensi negara melalui kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan petani seperti stabilisasi harga pupuk yang mahal, sarana dan prasarana berupa irigasi maupun Jalan Usaha Tani (JUT), serta pengendalian harga hasil produksi petani.

Salah satu atensi pemerintah dibidang pertanian diwujudkan melalui kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan petani. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 tahun 2013 Pasal 44 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani. Memberikan perlindungan yang dimaksud adalah pemberian jaminan dalam harga komoditi yang menguntungkan, memperoleh sarana dan prasarana produksi, pemasaran hasil pertanian pokok, pengutamaan hasil pertanian pangan lokal dalam memenuhi

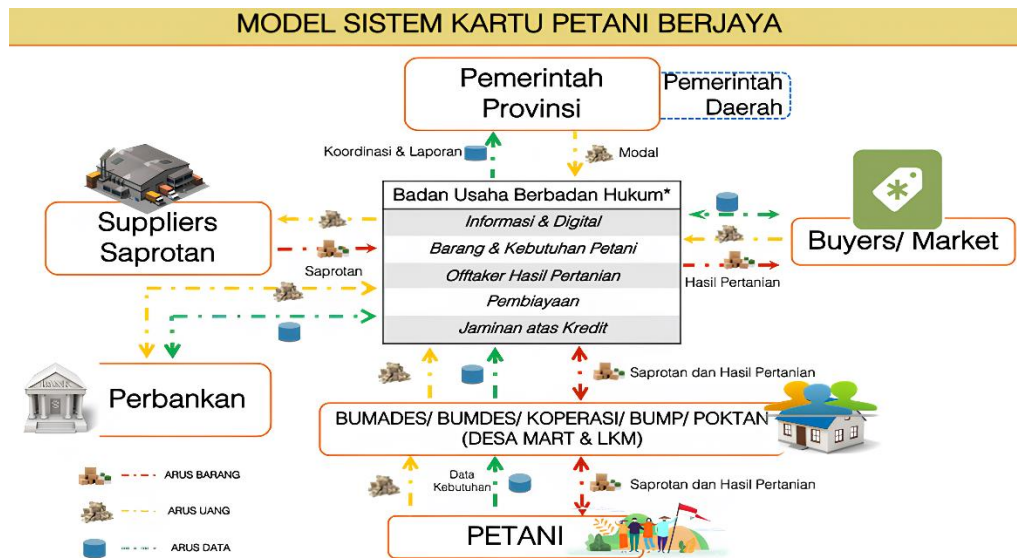
kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional, kompensasi akibat gagal panen, bencana alam, wabah hama atau puso, dan asuransi pertanian.

Selaras dengan peraturan tersebut, pemerintah daerah Provinsi Lampung membuat Program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya. Program ini merupakan salah satu bentuk janji kerja Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan. Ruang lingkup program Kartu Petani Berjaya (KPB) meliputi, pengelolaan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi, kelembagaan pengelolaan Program KPB, akses keuangan dan arus barang atau jasa, pendampingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program KPB.

Program Kartu Petani Berjaya (KPB) hadir untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul di sektor pertanian, seperti terbatasnya ketersediaan bibit dan pupuk bersubsidi, akses permodalan yang sulit, serta lemahnya daya saing komoditas hingga pemasaran hasil panen yang masih menjadi persoalan serius (Feraera & Syuryansyah, 2021). Akibat adanya permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Lampung membuat Program Kartu Petani Berjaya (KPB) dengan memanfaatkan teknologi di sektor pertanian agar petani di Provinsi Lampung siap menghadapi revolusi pertanian. Syarat agar dapat tergabung dalam program Kartu Petani Berjaya (KPB) antara lain petani harus tergabung dalam kelompok tani (Poktan), telah menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK), dan memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten pertama yang melaksanakan *soft launching* program Kartu Petani Berjaya (KPB) pada akhir tahun 2019 di Balai Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu menunjukkan keseriusan dan kesiapan dalam implementasi Kartu Petani Berjaya dengan melaksanakan sosialisasi secara serentak pada musim tanam kedua tahun 2021 atau pada bulan April 2021 di 9 kecamatan yaitu Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, Pagelaran, Pagelaran

Utara, Ambarawa, Pardasuka, Sukoharjo, Banyumas, dan Adiluwih. Berikut skema model sistem Kartu Petani Berjaya di Kabupaten Pingsewu.



**Gambar 1. Model Sistem Program Kartu Petani Berjaya**

Sumber: Juknis Kartu Petani Berjaya Kabupaten Pringsewu, 2023

Gambar 1 menunjukkan pelaksanaan program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang bersinergitas *bottom-up* dan *top-down planning*. Berbagai unsur kepentingan saling bekerjasama membentuk keseimbangan dalam pelaksanaan program Kartu Petani Berjaya (KPB) dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pihak perbankan, pembeli hasil pertanian, penyedia sarana produksi pertanian (*suppliers*), hingga kelompok sasaran yaitu kelompok tani dan petani. *Bottom-up planning* merupakan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah dengan mendengarkan aspirasi rakyat, dimana arus kebutuhan petani akan ditampung pada kelompok tani atau koperasi, kemudian akan disalurkan pada Badan Usaha Berbadan Hukum, dan terakhir, laporan kebutuhan petani akan diterima oleh pemerintah provinsi.

Sedangkan *top-down planning* merupakan perencanaan yang langsung dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Pemerintah provinsi akan memberikan intuksi permodalan kepada Badan Usaha Berbadan Hukum untuk memberikan

berbagai bantuan berupa sarana produksi pertanian (saprotan) kepada kelompok tani dan diberikan pada petani individu.

Hasil pra-riset pada 19 September 2023 di Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, tercatat sebanyak 816 kelompok tani dan 58 kios telah terdaftar pada *website* Kartu Petani Berjaya di Kabupaten Pringsewu. Namun, pelaksanaan program ini belum dijalankan secara merata. Hal ini diketahui dari pernyataan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu bahwa program KPB telah disosialisasikan keseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu akan tetapi di beberapa kecamatan masih sedikit kelompok tani yang menebus pupuk melalui Kartu Petani Berjaya (KPB) salah satunya Kecamatan Adiluwih. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Hanifah yang merupakan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program KPB (2022), yang menuturkan bahwa KPB belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan.

Kendala dalam pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya (KPB) juga disebabkan sulitnya membujuk kelompok sasaran untuk beralih dari cara tradisional ke digital (Feraera & Syuryansyah, 2021). Dalam pelaksanaan program KPB, kelompok tani juga seringkali mengalami kesulitan dalam penebusan pupuk subsidi yang disebabkan kompleksitas prosedur penebusan, atau petani tidak dapat melengkapi persyaratan penebusan yang mengakibatkan Kios Pupuk Lengkap (KPL) harus menolak/membatalkan penebusan pupuk.

Masalah lain yang muncul adalah ketika petani telah melakukan pembayaran secara non-tunai, namun ternyata pupuk subsidi sudah tidak tersedia di Kios Pupuk, sehingga mengakibatkan miskomunikasi. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah dengan *stakeholder* secara kontinu sangatlah penting untuk menarik kelompok sasaran menerima transformasi digital dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan petunjuk teknis Kartu Petani Berjaya (KPB) Kabupaten Pringsewu pelaksanaan program KPB di Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu dilaksanakan dengan pendampingan. Pendampingan diberikan dalam rangka memberikan pembinaan dan jaminan pelaksanaan program yang terukur dan terkontrol. Pendampingan program KPB dapat berupa sosialisasi, pengumpulan basis data, bimbingan teknis, pendampingan pelaksanaan operasional kegiatan program KPB, dan monitoring, evaluasi, pelaporan.

Dalam perspektif kebijakan implementasi khususnya implementor dalam melakukan sosialisasi terdapat beberapa hal penting yang harus dimiliki, seperti kompetensi (kualitas) implementor dan jumlah implementor yang tercukupi (kuantitas). Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu sebagai instansi yang bertanggung jawab atas implementasi program Kartu Petani Berjaya (KPB) di Kabupaten Pringsewu, melalui Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang ada di tiap kecamatan. Sehingga, Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu membuat tim implementasi Kartu Petani Berjaya (KPB) tingkat kecamatan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 520/24/SK/D.18/2023 tentang Tim Elektronik Kartu Petani Berjaya (E-KPB) Tingkat Kecamatan Kabupaten Pringsewu.

**Tabel 1. Tim E-KPB Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pringsewu**

No	Kecamatan	Jumlah PPL	Wilayah Pembinaan (Pekon/Kelurahan)
<b>1</b>	<b>Adiluwih</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
2	Pagelaran	7	21
3	Ambarawa	5	8
4	Pagelaran Utara	5	9
5	Banyumas	5	9
6	Gading Rejo	9	22
7	Sukoharjo	6	16
8	Pringsewu	5	14
9	Pardasuka	5	13
Total		52	122

Sumber: SK Kepala Dinas Pertanian Nomor: 520/24/SK/D.18/2023

Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada tabel 1 menunjukkan bahwa total PPL sebanyak 52 orang dengan wilayah pembinaan E-KPB yang tersebar

di 9 kecamatan dengan jumlah pekon/kelurahan sebanyak 122. Artinya, terdapat beberapa penyuluh yang harus membina 3 hingga 4 pekon/kelurahan, contohnya di Kecamatan Adiluwih yang memiliki 5 penyuluh, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Jumlah Kelompok Tani dan Anggota di Kecamatan Adiluwih**

No	Pekon	Jumlah Poktan	Tim E-KPB (PPL Adiluwih)
1	Kutawaringin	11	Saifurrohman, SP
2	Totokarto	6	
3	Tritunggal Mulyo	12	
4	Tunggul Pawenang	6	Tri Wahyuningsih, A.Md
5	Srikaton	15	
6	Adiluwih	10	Teguh Susanto, SP
7	Waringinsari Timur	14	
8	Purwodadi	10	Masruri, A.Md
9	Enggal Rejo	8	Solihin, SP
10	Sukoharum	9	
11	Bandung Baru	7	Tidak masuk dalam wilayah
12	Bandung Baru Barat	6	pembinaan E-KPB
13	Sinar Waya	4	
<b>Total</b>		<b>118</b>	

Sumber: Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 520/24/SK/D.18/2023

Tabel 2 menunjukkan banyaknya Kelompok Tani (Poktan) di Kecamatan Adiluwih sejumlah 118 kelompok tani. Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 520/24/SK/D.18/2023 tentang Tim Elektronik Kartu Petani Berjaya (E-KPB) Tingkat Kecamatan Kabupaten Pringsewu, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kecamatan Adiluwih hanya 5 orang, serta di 3 pekon seperti Pekon Bandung Baru, Bandung Baru Barat, dan Sinar Waya tidak tercantum dalam wilayah pembinaan E-KPB padahal terdapat kelompok tani di wilayah tersebut. Hal ini membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 520/24/SK/D.18/2023 terkesan dibuat secara asal-asalan (formalitas) dan menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, yang berbunyi “Penempatan Penyuluh Pertanian didesa/kelurahan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Apabila dalam satu desa terdapat lebih besar atau sama dengan 8 (delapan) kelompok tani, maka dapat ditempatkan 1 (satu) Penyuluh Pertanian;
- b) Apabila dalam satu desa terdapat kurang dari 8 (delapan) kelompok tani, maka dapat ditempatkan 1 (satu) Penyuluh Pertanian untuk membina 2 (dua) desa.
- c) Apabila dalam satu desa tidak berpotensi agribisnis maka tidak ditempatkan Penyuluh Pertanian”.

Kurangnya penyuluh secara kuantitas akan mempengaruhi proses implementasi Kartu Petani Berjaya di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Selain itu, berdasarkan hasil pra-riset pada 11 Desember 2023 di Kecamatan Adiluwih ditemukan informasi bahwa Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang tergabung dalam tim E-KPB yaitu Bapak Saifurrohman, belum memahami secara keseluruhan mengenai program Kartu Petani Berjaya. Sehingga, pelaksanaan program KPB di Kecamatan Adiluwih belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan.

Penelitian yang dilakukan Nabila tahun 2023 di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat mendapati pemegang Kartu Petani Berjaya (KPB) dan pemilik Kios Pupuk Lengkap (KPL) masih menggunakan mekanisme lama dalam penebusan pupuk bersubsidi yang disebabkan ketidakpahaman kelompok tani dan pemilik kios dalam penggunaan KPB. Mekanisme penebusan pupuk menggunakan Kartu Petani Berjaya masih dipandang rumit oleh kelompok tani karena kurangnya informasi tata cara penggunaan KPB dari penyuluh pertanian lapangan (Nabila, 2023).

Sedangkan, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu karena Kecamatan Adiluwih merupakan salah satu wilayah kering dengan potensi unggul di sektor pertanian jagung. Meskipun Kabupaten Pringsewu bukan penghasil jagung terbesar di Provinsi Lampung, namun jagung merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Pringsewu. Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan,

dan subsektor kehutanan. Tanaman jagung merupakan salah satu komoditas dari subsektor tanaman pangan.

**Tabel 3. Luas Panen Jagung Menurut Kecamatan (ha), 2023**

No	Kecamatan	Luas Panen
1	Pardasuka	4
2	Ambarawa	-
3	Pagelaran	204
4	Pagelaran utara	409
5	Pringsewu	17
6	Gading rejo	67
7	Sukoharjo	700
8	Banyumas	433
<b>9</b>	<b>Adiluwih</b>	<b>5.002</b>
	Jumlah	6.834

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

Tabel 3 menunjukkan Kecamatan Adiluwih menjadi daerah penghasil jagung terluas diantara kecamatan lainnya. Luas panen jagung di Kecamatan Adiluwih mencapai 5.002 hektare. Unggulnya Kecamatan Adiluwih di sektor komoditas jagung ini disebabkan karena Kecamatan Adiluwih memiliki kualitas tanah yang baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman jagung secara optimal dan iklim yang sangat mendukung pertanian jagung, dengan curah hujan yang cukup dan suhu yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman jagung.

Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi seperti rumitnya penebusan pupuk subsidi melalui Kartu Petani Berjaya, kurangnya sosialisasi secara massif oleh penyuluh karena keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas, landasan hukum yang dibuat asal jadi, dan kurangnya kesadaran kelompok tani terhadap digitalisasi pada sektor pertanian, membuat kajian tentang implementasi Kartu Petani Berjaya penting untuk diteliti. Sehingga, penulis tertarik untuk mengkaji topik penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Kartu Petani Berjaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Menghasilkan gambaran mengenai proses implementasi program Kartu Petani Berjaya (KPB) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dengan cara analisa perilaku organisasi dan hubungan antar organisasi, perilaku implementor tingkat bawah, dan perilaku kelompok sasaran.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Teoritis (Akademik)**

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan atau pembanding bagi siapa saja (khalayak umum) yang melakukan penelitian dengan tema yang sama untuk menentukan ruang kosong yang belum diteliti atau kebaruan penelitian (*novelty*).

### **2. Praktis (Pragmatis)**

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau saran untuk Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan Adiluwih untuk meningkatkan kompetensi (kualitas), komitmen, koordinasi dan sosialisasi, etos kerja dan profesionalisme yang tinggi dalam implementasi kebijakan Program Kartu Petani Berjaya, agar implementasi Kartu Petani Berjaya di Kecamatan Adiluwih berjalan lebih baik dikemudian hari. Penelitian ini juga bermanfaat untuk peneliti sendiri dalam menambah wawasan dan pengalaman untuk menganalisis proses implementasi Program Kartu Petani Berjaya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mengkaji tentang implementasi kebijakan atau program, namun pada masing-masing penelitian memiliki karakteristik hasil yang beragam sesuai dengan fokus yang diangkat. Penelitian terdahulu berguna sebagai pembanding untuk melihat unsur kebaruan (*novelty*) antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang relevan untuk pembanding.

**Tabel 4. Penelitian Terdahulu**

No	Nama, dan Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Oni Lestari dan Hendra Wijayanto, (2022) “Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani (Studi Kasus pada Petani Nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalinga Jawa Tengah)”	Model Soren C. Winter: 1. Perilaku hubungan antar organisasi 2. Perilaku aparat birokrasi tingkat bawah 3. Perilaku kelompok sasaran.	<b>1. Perilaku hubungan antar organisasi</b> BPP berkoordinasi dengan kelompok tani, dinas pertanian, kios pupuk, dan Bank BRI dalam mendata RDKK. <b>2. Perilaku aparat birokrasi tingkat bawah</b> BPP melaksanakan kebijakan secara diskresi, dilihat dari pendekatan komunikasi dengan petani, melibatkan pihak lain seperti PPL, KPL, dan BRI. <b>3. Perilaku kelompok sasaran</b> Respon positif terlihat dari sikap menerima dan merasakan kemudahan mengakses pupuk dengan harga murah, dan respon negatif berasal dari masalah Kartu Tani yang sering eror.

2. Aslan Jufri, Muhammad Syukur, dan Bakhtiar (2022) “Implementasi Kebijakan Penggunaan Kartu Tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”
- Model Edward III:
1. Komunikasi
  2. Sumberdaya
  3. Disposisi
  4. struktur birokrasi
- 1. Komunikasi**  
Penyampaian informasi melalui sosialisasi, meski belum optimal karena banyak petani yang belum mengerti penggunaan kartu tani.
- 2. Sumberdaya**  
Sumberdaya terdiri dari tim penyuluh, Bank BRI, kios pengecer, dan petani. Sumber daya lainnya berupa peralatan, seperti perangkat uji tanah, mesin EDC, dan pupuk subsidi.
- 3. Disposisi**  
Implementor paham tugas dan tantangan yang dihadapi dan tetap menjalankan tugasnya sebagai bentuk profesionalitas.
- 4. Struktur birokrasi**  
Birokrasi merubah sistem penebusan pupuk sesuai SOP menggunakan uang tunai agar memudahkan petani.
3. Yusup Nugraha, Agus Dedi, dan S. Munir (2022) “Implementasi Program Kartu Tani di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran”
- Model Van Meter dan Van Horn:
1. Ukuran dan tujuan kebijakan,
  2. Sumber-sumber
  3. Karakteristik instansi pelaksana
  4. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan
  5. Sikap pelaksana
  6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
- 1. Ukuran dan tujuan**  
Kelompok tani kurang memahami standardan tujuan program, sehingga sedikit petani yang menggunakan kartu tani.
- 2. Sumber-sumber**  
Belum optimalnya jaringan internet membuat mesin EDC sering eror, dan kesulitan mencairkan anggaran.
- 3. Karakteristik instansi pelaksana**  
Penyuluh lapangan dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan berintegritas tinggi.
- 4. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan**  
Kelompok tani enggan mengikuti forum diskusi yang mempersulit proses pembinaan kelompok tani.
- 5. Sikap pelaksana**  
Kurangnya komitmen penyuluh membuat terhambatnya penyampaian informasi.
- 6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik**  
PPL berkoordinasi dengan pimpinan tentang perkembangan pelaksanaan program.

Penelitian terdahulu pada tabel 4, menggunakan objek penelitian berupa program Kartu Tani milik Kementerian Pertanian, sedangkan penelitian ini menggunakan objek program Kartu Petani Berjaya milik Pemerintah Provinsi Lampung yang diberlakukan di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Ketiga penelitian terdahulu menggunakan teori yang berbeda-beda, yaitu teori Soren C. Winter, Edward III, serta teori Van Meter dan Van Horn. Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, terdapat teori yang sama dengan penelitian ini yakni teori milik Soren C. Winter. Penelitian ini menganalisis perilaku implementor tingkat bawah yang mencakup kontrol organisasi, etos kerja, dan norma profesionalisme yang belum diteliti oleh penelitian terdahulu di atas. Hal inilah yang menjadi pelengkap pada penelitian terdahulu dan keterbaruan penelitian.

## **2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai keputusan yang berisi peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut. Menurut beberapa ahli seperti David Easton, kebijakan publik merupakan “*the authoritative allocation of values for the whole society*”, kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (otoritatif) kepada seluruh anggota masyarakat (dalam Taufiqurokhman, 2014). Udoji mendefinisikan kebijakan publik (*public policy*) sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan dan masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat (dalam Abdoellah & Rusfiana, 2016).

Menurut William Dunn, kebijakan publik memiliki beberapa tahapan yang dimulai dari penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan, adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan publik, hingga evaluasi kebijakan (dalam Patarai, 2020).

- 1) Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Pada tahap awal ini, pembuat kebijakan akan membahas, memilih dan memfokuskan beberapa masalah publik yang dinilai perlu atau tidak untuk ditangani. Sehingga masalah yang telah dipilih untuk ditangani akan masuk kedalam agenda kebijakan. Dalam proses ini membutuhkan kecermatan agar masalah itu benar sesuai realita yang terjadi atau sebaliknya (Septiana dkk., 2023).

2) Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)

Selanjutnya, masalah publik yang telah masuk ke agenda kebijakan akan dibahas oleh para aktor yang berkepentingan (*policy makers*) untuk mendapatkan alternatif-alternatif pemecahannya (Septiana dkk., 2023).

3) Adopsi Kebijakan

Beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan *policy makers*, akan ada salah satu alternatif kebijakan yang dipilih dan diadopsi dengan *consensus majority* seperti mayoritas legislative maupun konsensus antar aktor untuk mengatasi masalah tersebut.

4) Implementasi Kebijakan Publik (*Policy Implementation*)

Kebijakan yang telah diputuskan akan dilaksanakan oleh implementor dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Terdapat kebijakan yang akan di dukung dan adapula kebijakan yang mendapat pertentangan (Septiana dkk., 2023).

5) Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Kebijakan yang telah diimplementasikan akan dinilai dan dievaluasi untuk melihat seberapa jauh tingkat keberhasilan kebijakan tersebut dalam memecahkan masalah sesuai target yang diinginkan.

## 2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

### 2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan memiliki arti yang cukup luas, bukan hanya sekedar pelaksanaan dari harapan, tetapi sebagai serangkaian tindakan yang dipengaruhi berbagai faktor yang menjadi ukuran keberhasilan program yang dilaksanakan. Secara ontologis, implementasi

dimaksudkan untuk memahami fenomena mengapa terdapat kebijakan publik gagal diimplementasikan di suatu lokasi atau daerah tertentu. Implementasi digunakan untuk memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena, baik faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi suatu kebijakan (Tresiana & Duadji, 2021).

Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi sebagai segala sesuatu yang terjadi setelah dirumuskan atau diberlakukannya suatu program dan fokus perhatian, sedangkan implementasi kebijaksanaan adalah kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya ataupun untuk menimbulkan dampak pada masyarakat secara nyata (dalam Wahab, 2008). Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan (Kasmad, 2013).

### **2.3.2 Proses Implementasi Kebijakan Publik**

Proses implementasi kebijakan terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Secara umum, tahapan kerja para peneliti yang menggunakan pendekatan *top-down* meliputi beberapa langkah, yaitu memilih kebijakan yang akan dikaji, mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen tersebut, mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang ada, mengevaluasi apakah keluaran kebijakan tersebut memiliki manfaat bagi kelompok sasaran. Selain itu, para

peneliti mengidentifikasi dampak yang muncul setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang diterima, selanjutnya analisis untuk mengetahui apakah dampak tersebut berimplikasi pada pencapaian tujuan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebijakan (Tresiana & Duadji, 2019).

Sedangkan, pendekatan *bottom-up* muncul sebagai tanggapan terhadap ketidakpuasan dan kritik terhadap pendekatan *top-down*. Para pengkritik pendekatan *top-down* berpendapat bahwa implementasi kebijakan seringkali kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan isu efektivitas atau efisiensi. Karena ketidakpuasan ini, beberapa peneliti mengembangkan pendekatan *bottom-up*. Pendekatan *bottom-up* menggunakan logika berpikir dari “bawah” ke “atas” di mana proses dimulai dari keinginan masyarakat yang kemudian disalurkan ke pemerintah. Pemerintah kemudian membuat peraturan dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya, berdasarkan berbagai pertimbangan. Menurut Parsons dalam (Nurchayanto, 2016), model *bottom-up* memandang proses ini sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus, serta menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan fleksibilitas dalam penerapan kebijakan.

Dalam menganalisis implementasi program Kartu Petani Berjaya, peneliti menggunakan pendekatan *top-down*. Pendekatan ini dipilih karena program Kartu Petani Berjaya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, dilanjutkan ke tingkat kabupaten hingga ke tingkat paling bawah yakni kecamatan untuk diimplementasikan kepada kelompok tani.

### **2.3.3 Program**

Pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program, seperti pendapat Grindle yang menyatakan bahwa “implementasi adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan suatu program” (Tachjan, 2006). Menurutnya isi program harus menggambarkan

beberapa hal, seperti kepentingan yang terpengaruhi oleh program, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, status pembuat keputusan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang digunakan. Sedangkan, Terry mengemukakan bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang telah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program ini menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda, standar, dan budget (Tachjan, 2006). Sejalan dengan pendapat tersebut, Siagian dalam Tachjan (2006) mengidentifikasi ciri-ciri program sebagai berikut:

- a. Sasaran yang akan dicapai;
- b. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. Banyaknya biaya yang diperlukan dan sumbernya;
- d. Jenis kegiatan yang akan dilakukan; dan
- e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik dari jumlahnya maupun; keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

#### **2.3.4 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik akan mudah dipahami jika menggunakan model atau kerangka pemikiran tertentu. Model implementasi kebijakan akan memberikan gambaran secara detail tentang suatu objek, proses, dan situasi, beserta komponen-komponen yang terkandung dalam objek, proses, dan situasi tersebut, serta bagaimana korelasi antara komponen yang satu dengan yang lainnya (Tachjan, 2006). Model-model dalam implementasi kebijakan publik diantaranya yaitu:

##### a) Model Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn disebut juga dengan “*A Model of the Policy Implementation*” atau model implementasi kebijakan dimana proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan direalisasikan. Model Van Meter dan Van Horn menawarkan pendekatan dengan



menghubungkan antara isu kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Menurut Van Meter dan Van Horn, kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan (Agustino, 2008) yaitu:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik agen pelaksana (*implementor*);
- 4) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- 5) Kecenderungan (*sikap*) *implementor*;
- 6) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik;

b) Model Merilee S. Grindle

Grindle mengemukakan bahwa secara umum implementasi memiliki tugas untuk membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah (Rusli, 2013). Sehingga, fungsi implementasi sebagai “*a policy delivery sistem*” yaitu sebuah sistem untuk penyampaian kebijakan, dimana sarana tertentu yang dirancang dan dijalankan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam model Grindle, kegiatan program yang telah dirancang dengan pembiayaan yang cukup, isi kebijakan dan konteks implementasi menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan (Tahir, 2011). Kerangka pemikiran Grindle, keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat kemampuan implementasi (*implementability*) dari kebijakan tersebut, yaitu *Content* dan *Context*. Isi (*Content*) kebijakan, meliputi:

- 1) Kepentingan kelompok sasaran (*Interest affected*)
- 2) Jenis manfaat (*Type of benefits*)
- 3) Tingkat perubahan yang diharapkan (*Extent of change envisioned*)
- 4) Status/kedudukan pengambilan keputusan (*Site of decision making*)

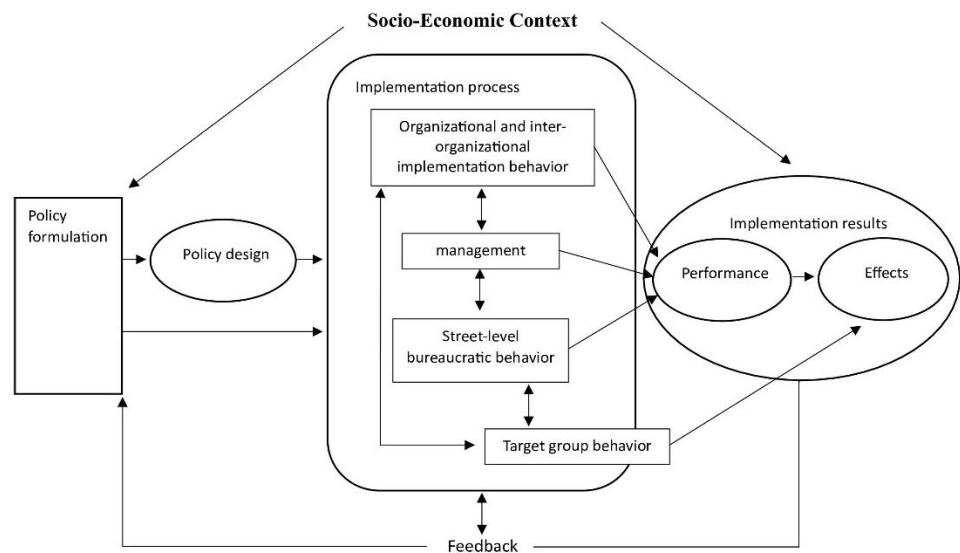
- 5) Pelaksana program (*Program implementor*)
- 6) Sumber daya yang digunakan (*Resources committed*)

Sedangkan konteks (*Context*) implementasinya, meliputi:

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat (*Power, interest, and strategies of actors involves*)
- 2) Karakteristik institusi dan rezim (*Institution and regime characteristics*)
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap (*Compliance and responsiveness*)

c) Model Soren C. Winter

Soren C. Winter pada tahun 2003 memperkenalkan model implementasi integrative (*integrated implementation model*), menurutnya keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi, proses, dan dampak (hasil) dari implementasi kebijakan itu sendiri (Mustari, 2015).



Gambar 2. Model Implementasi Terpadu (*Integrated*)

Sumber: Ritter (2020)

Model Soren C. Winter menawarkan 3 variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses implementasi, yaitu:

1. Perilaku organisasi dan hubungan antar organisasi (*Organizational and inter-organizational implementation behavior*)

a) Komitmen

Menurut Winter, komitmen birokrasi tingkat bawah dalam menerapkan kebijakan yang telah diberikan menjadi faktor penting bagi mereka untuk mengambil tindakan dalam sebuah kebijakan (Mustari, 2015).

b) Koordinasi antar organisasi

Kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaan pekerjaan, karena koordinasi merupakan fungsi manajemen yang berperan penting dan setara dengan fungsi manajemen lainnya.

2. Perilaku birokrasi tingkat bawah (*Street-level bureaucratic behavior*)

a) Kontrol organisasi

Kontrol organisasi berfungsi sebagai pengawas terhadap tindakan yang dilakukan oleh staf, baik didalam maupun diluar lingkungan kerja, agar pegawai dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Menurut Sarwoto, pengawasan merupakan kegiatan pimpinan yang mengusahakan supaya seluruh pekerjaan terlaksana sesuai rencana yang di harapkan (Mustari, 2015).

b) Etos kerja

Usman Pelly mengartikan etos kerja sebagai sikap yang muncul atas kesadaran diri dan kemauan yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap pekerjaan seseorang (Mustari, 2015). Sehingga, etos kerja dapat diartikan sebagai hal penting dalam suatu pekerjaan, sehingga seseorang harus memiliki etos kerja untuk menunjang pekerjaannya.

c) Norma profesionalisme

Sumber daya manusia menjadi faktor paling penting dalam proses implementasi kebijakan, karena jika sumber daya manusia rendah maka tentu saja kebijakan akan tidak terimplementasi dengan baik. Sumber daya manusia dapat berwujud kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sering kali implementasi kebijakan terkendala karena sikap aparat yang tidak ditunjang dengan profesionalisme yang baik (Mustari, 2015).

3. Perilaku kelompok sasaran (*Target group behavior*)

Kelompok sasaran tidak hanya memberikan pengaruh terhadap kebijakan, tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah. Jika pengaruh yang ditimbulkan baik, maka kinerja aparat tersebut juga akan baik, demikian sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif dan negative dari masyarakat untuk mendukung atau tidak mendukung kebijakan yang disertai umpan balik atau tanggapan *target group* terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

a) Respon positif

Respon positif akan menjadi tambahan energi bagi implementor dan tanpa adanya dukungan dari kelompok sasaran (*target group*) suatu kebijakan tidak akan berjalan maksimal.

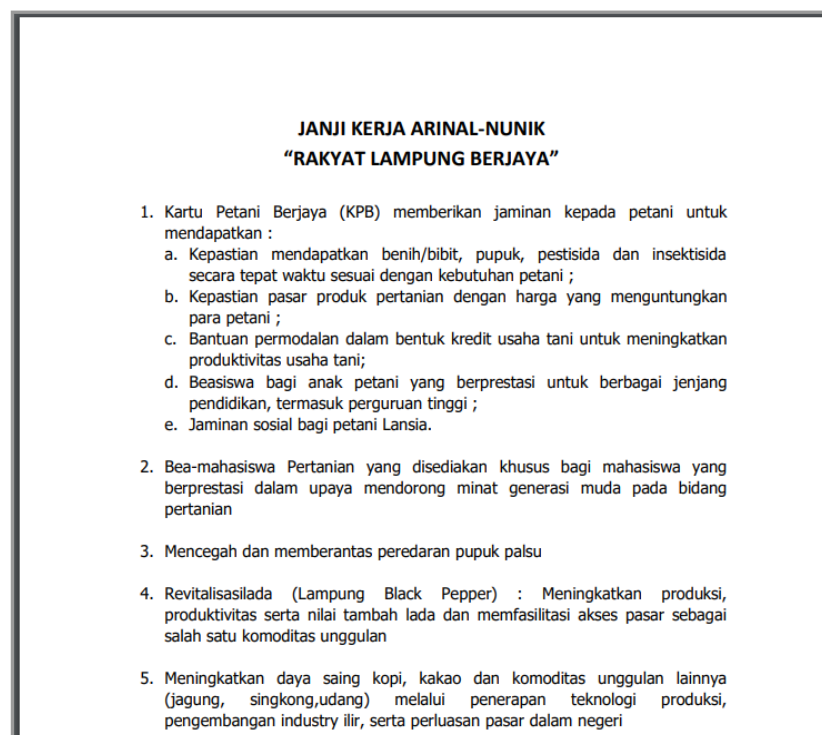
b) Respon negatif

Respon negatif dari kelompok sasaran maupun masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi aktor kebijakan.

## 2.4 Tinjauan Tentang Kartu Petani Berjaya (KPB)

Latar belakang diciptakannya Program Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (e-KPB) yaitu sebagai perwujudan nyata Visi Pembangunan Provinsi Lampung 2019-2024 "Rakyat Lampung Berjaya" oleh Gubernur

Lampung Arinal Djunaidi yang diterjemahkan dalam misi kedua yaitu *Good Governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik dan misi kelima yaitu membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan perkotaan. Gubernur Arinal berkomitmen melalui 33 janji kerja yang akan diimpelentasikan kedalam program prioritas, di antaranya di bidang pertanian melakukan upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui Program Kartu Petani Berjaya, Bea-Mahasiswa Pertanian, memberantas peredaran pupuk palsu, revitalisasi lada, peningkatan daya saing komoditi unggulan (kopi, kakao, jagung, singkong dan udang), memfungsikan BUMD untuk produk pertanian dan peningkatan kesejahteraan nelayan (Pemprov Lampung, 2019). Dalam janji kerja Arinal-Nunik yang memuat 33 janji, Kartu Petani Berjaya (KPB) terlatak pada point pertama. Hal ini menunjukkan KPB adalah program prioritas yang menjadi konsern utama Gubernur Lampung selama menjabat.



**Gambar 3. Janji Kerja Gubernur Lampung**

Sumber: PPID Lampung, 2021

### 2.4.1 Definisi Kartu Petani Berjaya (KPB)

Kartu Petani Berjaya adalah kartu elektronik identitas petani yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam program Kartu Petani Berjaya yang memuat data lengkap 1 (satu) orang petani (Pergub Lampung Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 6). Program Kartu Petani Berjaya (KPB) merupakan pembaharuan dari kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Pertanian) yaitu Kartu Tani dengan menggunakan *billing system* yang dibuat oleh Kementerian Pertanian untuk mengatur penyediaan pupuk bagi para petani di Indonesia. Kartu Tani hanya berfokus pada penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah kepada petani, sedangkan Kartu Petani Berjaya memiliki sistem yang lebih kompleks berbasis *Mobile Apps*, *Web Apps*, dan *Quick Response Code* (QRCode).

*Billing system* merupakan bukti transaksi pembayaran atau sistem yang membantu pemerintah dalam mengatur, mencatat, dan menghitung biaya yang telah terjadi dalam aplikasi atau website. Sistem ini kemudian terintegrasi dalam Program Kartu Petani Berjaya. Untuk meningkatkan penghasilan petani, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya, memiliki tujuan dalam memberikan jaminan kepastian dalam usaha pertanian yang terintegrasi dalam Kartu Petani Berjaya, antara lain:

- a) Ketersediaan sarana produksi pertanian (saprotan);
- b) Akses keuangan permodalan perbankan, koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan akses keuangan lainnya yang sah;
- c) Pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk pendampingan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi;
- d) Penanganan panen dan pasca panen;
- e) Pemasaran hasil usaha pertanian melalui pasar atau pembeli.



**Gambar 4. Beranda Elektronik Kartu Petani Berjaya Provinsi Lampung**

Sumber: *Website e-KPB Lampung*, 2024

Gambar 3 menunjukkan bahwa Program Kartu Petani Berjaya telah bertransformasi menjadi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (e-KPB) bertujuan untuk memudahkan petani dalam penyediaan sarana pertanian, akses permodalan, pembinaan manajemen usaha tani dan teknologi, hingga pemasaran hasil panen. Program Kartu Petani Berjaya menghubungkan berbagai kepentingan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Terdapat beberapa layanan (fitur) yang terintegrasi dalam program e-KPB yang dapat membantu produktivitas petani, diantaranya E-Keanggotaan, E-Saprotan, E-Pubers, E-Permodalan, E-Asuransi, E-Beasiswa, E-Bantuan, E-Pemasaran/e-Market, E-Gudang Ternak, Halo Medik Vet, E-Alsintan, E-Sertifikasi, E-OKKPD, dan E-Lelang.

#### **2.4.2 Kepesertaan Anggota Program Kartu Petani Berjaya (KPB)**

Pihak-pihak yang terlibat dalam program Kartu Petani Berjaya yaitu sebagai berikut:

- 1) Petani dan kelompok tani, sebagai pengguna program Kartu Petani Berjaya yang melakukan kegiatan pertanian dengan mendapatkan kemudahan, mulai dari akses permodalan, penyediaan sarana produksi pertanian, alat mesin pertanian serta penjualan hasil

pertanian. Serta penebusan pupuk bersubsidi diharuskan secara kolektif.

- 2) Penyuluh pertanian, bertugas mensosialisasikan program dan mengisi rekomendasi Rencana Usaha sesuai dengan wilayah kerja masing-masing penyuluh.
- 3) Pabrik pupuk, peptisida, obat-obatan tanaman, bibit, dan benih, bertugas menyediakan pupuk, peptisida, obat-obatan tanaman, bibit, dan benih yang diperlukan petani dalam proses produksi pertanian.
- 4) Kios/pengecer, bertugas menyediakan produk pertanian baik subsidi (jika masih ada alokasi) dan non subsidi.
- 5) Lembaga keuangan (Bank atau Koperasi), bertugas menyalurkan modal kepada petani yang memenuhi persyaratan sesuai sistem perbankan.
- 6) Pemerintah daerah, berwenang untuk menerbitkan kartu elektronik identitas petani secara kolektif atau berkelompok dalam Program Kartu Petani Berjaya.

#### **2.4.3 Tujuan Program Kartu Petani Berjaya (KPB)**

Tujuan program Kartu Petani Berjaya (KPB) adalah untuk mencapai kesejahteraan petani yang meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi, kewirausahaan, dan manajemen usaha tani melalui penyuluhan pertanian, dan pengembangan sistem pendidikan dibidang pertanian;
- 2) Pengembangan pasar dan jaringan pemasaran yang berpihak kepada petani berupa pasar alternatif dengan rantai tata niaga pendek (*direct marketing*), mendorong terwujudnya organisasi tani yang kuat dan berakar serta meningkatkan kemudahan layanan akses sumber informasi dan teknologi;
- 3) Penyuluhan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) yang meliputi mengenai informasi prakiraan iklim yang handal guna menekan angka gagal panen akibat perubahan iklim yang



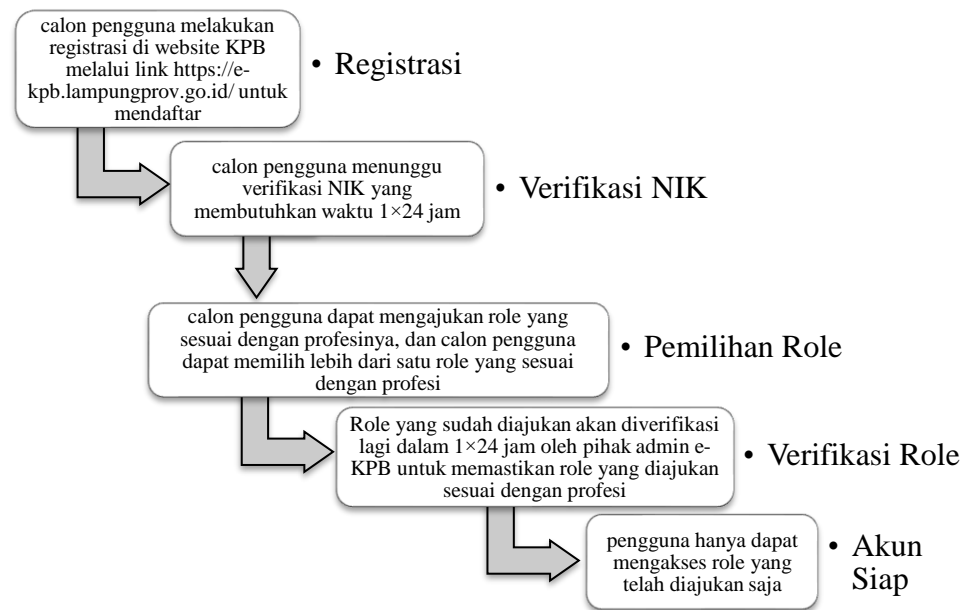
ekstrim. Dengan adanya informasi prakiraan iklim yang handal petani dapat menyesuaikan sistem budidaya atau strategi penanaman dengan prakiraan iklim tersebut;

- 4) Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi, kewirausahaan, dan manajemen usaha tani melalui penyuluhan pertanian, dan pengembangan sistem pendidikan dibidang pertanian;
- 5) Pembiayaan pertanian melalui lembaga keuangan khusus yang melayani petani;
- 6) Pengawasan kondisi pertanian daerah, membuat kebijakan, dan menjamin stabilitas harga jual hasil pertanian.

#### **2.4.4 Cara Mendaftar Menjadi Anggota e-KPB**

Dengan menjadi anggota Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (e-KPB), pengguna dapat menikmati berbagai bentuk layanan sesuai dengan role-nya. Role adalah suatu peran atau fungsi spesifik yang dipilih oleh pengguna. Adapun role dalam e-KPB yaitu Petani KPB, Kelompok Tani (Poktan), Petani Perkebunan (Pekebun), petani yang memiliki ternak (Peternak), kelompok ternak (Poker), penyedia layanan asuransi, koperasi, Tim IT Operation, Lembaga Bantuan, Bumdes untuk pupuk non subsidi, Admin Halo Medic Vet, Admin Eksekutif, Admin Eksekutif Provinsi, Admin Eksekutif Kabupaten, dan Pimpinan atau Eksekutif Tingkat Provinsi.

Untuk registrasi anggota e-KPB dapat melalui 3 opsi pendaftaran. Opsi pertama, calon pengguna dapat registrasi secara mandiri. Opsi kedua, yaitu secara otomatis terdaftar di alokasi. Terakhir, jika calon pengguna adalah kelompok petani mandiri/perorangan, maka dapat mendaftar langsung di call center e-KPB. Cara registrasi secara mandiri di e-KPB yaitu sebagai berikut:



**Gambar 5. Bagan Registrasi Anggota E-KPB**

Sumber: Juknis KPB Pringsewu, 2023

#### 2.4.5 Proses Transaksi Pupuk Subsidi pada Website Kartu Petani Berjaya Melalui Akun Kelompok Tani (Poktan)

Sebelum melakukan penebusan pupuk, terdapat syarat-syarat yang dalam pemesanan pupuk subsidi, diantaranya terdapat akun Poktan, terdapat akun kios, terdapat rekening kios, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Petani terdaftar di e-Alokasi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi melalui website Kartu Petani Berjaya (KPB) yaitu sebagai berikut:

- 1) Membuka *web browser* pada perangkat komputer atau *smartphone*
- 2) Memasukkan URL (<https://e-kpb.lampungprov.go.id>) pada halaman URL.
- 3) Kelompok tani (Poktan) dapat melakukan *login* dengan akun yang telah didaftarkan dan diverifikasi NIK ataupun Role oleh admin KPB Center

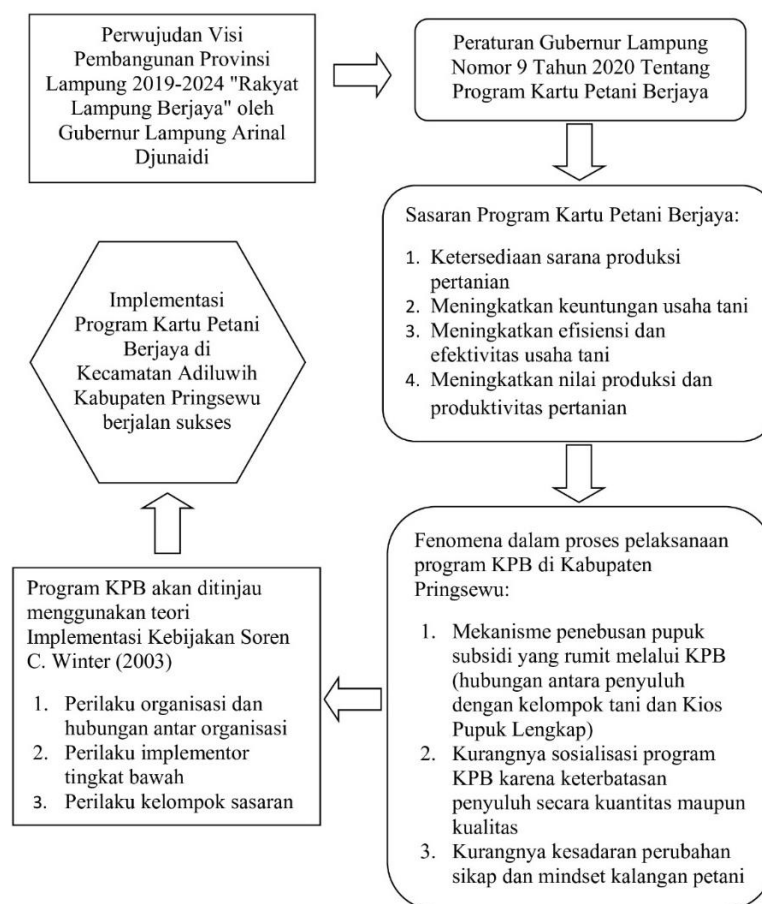
- 4) Setelah berhasil *Login*, maka akan muncul menu. Selanjutnya pilih layanan yang terdapat pada Menu Layanan Poktan.
- 5) Setelah mengklik Lihat Layanan Poktan, maka akan muncul menu e-Suber Poktan dan klik lihat Menu
- 6) Setelah itu akan menampilkan menu Data e-Alokasi Poktan, Data Penebusan, dan Data Anggota
- 7) Selanjutnya klik Data e-Alokasi Poktan dan akan menampilkan Data e-Alokasi yang ingin diajukan
- 8) Selanjutnya, pada menu Data Penebusan akan menampilkan detail transaksi seperti keterangan transaksi berhasil atau tidak, upload bukti pembayaran, dan mengkonfirmasi jika pupuk telah diterima.

## 2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual mengenai teori yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kerangka pikir berguna sebagai dasar dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan secara terbuka mengakibatkan penyaluran pupuk belum tepat sasaran, kenaikan harga pupuk ditingkat petani, dan terjadi kelangkaan (Nabila, 2023). Sebagai upaya penyediaan sarana pertanian yang lebih baik, pemerintah Provinsi Lampung menjawab membuat program Kartu Petani Berjaya (KPB). Program KPB berfungsi sebagai penghubung bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pertanian, seperti petani, pembeli hasil pertanian, distributor, perbankan, dan pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Sistem Kartu Petani Berjaya berjalan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berbasis keanggotaan tertutup. Sasaran dari program ini adalah tersedianya sarana pertanian (pupuk bersubsidi dan bibit), meningkatkan keuntungan usaha tani, meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha tani, meningkatkan nilai produksi dan produktivitas pertanian.

Salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang telah menerapkan program Kartu Petani Berjaya adalah Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

Kecamatan Adiluwih merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani jagung. Namun, faktanya masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, seperti terbatasnya jumlah penyuluh baik secara kuantitas maupun kualitas, sulitnya membujuk kelompok sasaran untuk beralih dari cara tradisional ke digital, dan rumitnya mekanisme penebusan pupuk subsidi melalui Kartu Petani Berjaya, sehingga kerap terjadi kesalahpahaman antara kelompok tani dan Kios Pupuk Lengkap (KPL) dalam penebusan pupuk subsidi melalui Kartu Petani Berjaya. Permasalahan ini terjadi disebabkan proses implementasi yang berjalan kurang baik. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Soren C. Winter, untuk menganalisis permasalahan implementasi yang terjadi. Sehingga, kerangka pikir pada penelitian ini mengacu pada teori atau model implementasi kebijakan menurut Soren C. Winter seperti pada gambar berikut.



**Gambar 6. Kerangka Pikir**

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

### **III. METODE PENELITIAN**

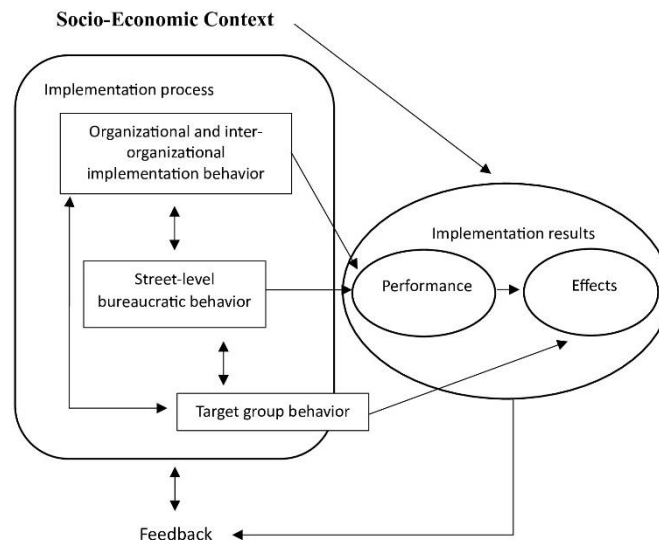
#### **3.1 Tipe dan Jenis**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif berkembang sebagai metode penelitian dalam lingkup permasalahan atau fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia (Hardani dkk, 2020). Sedangkan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang mengarahkan untuk memunculkan gejala-gejala, kejadian atau fakta secara akurat dan sistematis, tentang sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani dkk, 2020). Metode tersebut relevan dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yakni untuk mendapatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan program Kartu Petani Berjaya (KPB) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Pringsewu. Tujuan dipilihnya metode penelitian kualitatif karena untuk menganalisis lebih dalam bagaimana proses dan mengungkap dari setiap fenomena dalam pelaksanaan program KPB menurut pandangan pemerintah Kabupaten Pringsewu dan pandangan masyarakat di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dengan didukung oleh teoritik yang telah dibangun dalam kerangka pikir.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian digunakan untuk pembatasan objek yang akan diteliti dan pembatasan agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Pembatasan penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat urgensi (kepentingan) dan reliabilitas masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2013). Adapun fokus penelitian ini yaitu pada proses implementasi kebijakan, dengan menggunakan model implementasi kebijakan Soren C. Winter atau

model implementasi terpadu (*integrated*). Pada proses implementasi, model ini memiliki tiga dimensi yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 7. Model Implementasi Terpadu**

Sumber: Ritter (2020)

Pada gambar diatas, terdapat dimensi-dimensi yang dipakai dalam meneliti proses implementasi program Kartu Petani Berjaya di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, diantaranya adalah:

1. Perilaku organisasi dan hubungan antar organisasi (*organizational and inter-organizational implementation behavior*)

- a. Komitmen

Komitmen merupakan bentuk kesepakatan instansi dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program Kartu Petani Berjaya (KPB). Hal ini bertujuan menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang muncul, seperti rasa egoisme diantara organisasi pelaksana seperti Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang dapat mempengaruhi hasil implementasi.

- b. Koordinasi antar organisasi

Implementasi program Kartu Petani Berjaya (KPB) juga perlu didukung dan dikoordinasikan dengan lembaga atau organisasi lain

untuk mempercepat tercapainya program sesuai harapan. Koordinasi antar organisasi disini adalah koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Adiluwih, kelompok tani, dan kios pengecer pupuk.

2. Perilaku birokrasi tingkat bawah (*street-level bureaucratic behavior*)

Perilaku birokrasi tingkat bawah dimaksudkan sebagai kemampuan Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu sebagai implementor dalam menjalankan program Kartu Petani Berjaya (KPB) dengan menggunakan kewenangan diskresi. Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan program KPB akan dipengaruhi perilaku birokrasi salah satunya pengambilan keputusan penting saat adanya pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan pokok. Sehingga, dalam pelaksanaan program adakalanya mengalami penyimpangan dari tugas utama selaku pelaksana kebijakan. Oleh karenanya, terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk melihat bagaimana perilaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai implementor tingkat bawah, diantaranya kontrol organisasi (pengawasan) oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu terhadap kinerja PPL, etos kerja (motivasi) PPL dalam melaksanakan tugas, dan norma profesionalisme yang ditunjukkan PPL selama pelaksanaan program Kartu Petani Berjaya.

3. Perilaku kelompok sasaran (*target group behavior*)

Kelompok sasaran bukan hanya berpengaruh terhadap dampak kebijakan tetapi juga berpengaruh pada kinerja aparat tingkat bawah. Kelompok sasaran yang dimaksud disini adalah petani dan kelompok tani di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Perilaku kelompok tani terhadap hadirnya program Kartu Petani Berjaya (KPB) mencakup respon positif dan respon negatif. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana respon yang diberikan oleh kelompok tani dan petani dari hadirnya program KPB.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan peneliti. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan kesesuaian dengan topik yang dipilih, serta memiliki kemenarikan dan keunikan, dengan begitu peneliti dapat menemukan hal-hal yang baru dan bermakna (Suwarma Al-muchtar, 2015). Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Pringsewu, lebih tepatnya di Kecamatan Adiluwih. Pemilihan lokasi ini didasarkan dengan alasan potensi sumber daya alam yang cukup baik terutama di sektor pertanian dengan komoditas unggulan berupa jagung. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Pringsewu (2018), Kecamatan Adiluwih menjadi daerah penghasil jagung (pipilan kering) terbanyak di Kabupaten Pringsewu dengan luas panen mencapai 4.340 hektar dan produksi sebanyak 21.700 ton (Andriyani, 2023). Sedangkan pada tahun 2023 luas panen jagung di Kecamatan Adiluwih mengalami peningkatan menjadi 5.002 hektar dan mengungguli kecamatan-kecamatan lainnya.

### 3.4 Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2010). Sumber data adalah segala informasi yang diperoleh peneliti untuk menyusun hasil penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari kegiatan wawancara dan observasi yang dilakukan pada objek penelitian. Data primer diperoleh menggunakan teknik dalam pengambilan sampel sumber data dengan menentukan informan (*purposive sampling*) yang berkaitan dengan implementasi kebijakan program Kartu Petani Berjaya.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui media perantara berupa catatan ataupun dokumen baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum, yang bertujuan untuk menunjang sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui



media online terpercaya dan dari data yang dimiliki oleh narasumber atau berbagai pihak yang memiliki wewenang terhadap data tersebut.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, sumber, dan cara (Hardani dkk, 2020). Jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dokumentasi dan gabungan ketiganya (triangulasi). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

#### 1) Observasi

Sukmadinata menyatakan bahwa observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Hardani dkk, 2020). Observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu pada kegiatan sosialisasi program Kartu Petani Berjaya (KPB) di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, serta mengikuti kegiatan Mimbar Sarasehan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Adiluwih. Mimbar Sarasehan adalah salah satu forum penting dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Forum ini mempertemukan Pemerintah Daerah dengan para pelaku utama, yaitu petani, sebagai bentuk keterbukaan untuk menyampaikan usulan dan aspirasi.

#### 2) Wawancara (*Interview*)

Menurut Nazir, wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara pihak penanya dengan pihak penjawab (informan) dengan menggunakan *interview guide* atau panduan wawancara (Hardani dkk, 2020). Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Informan disini merupakan pihak-pihak yang telah ditentukan peneliti

sesuai kepemilikan informasi terpercaya mengenai implementasi kebijakan program KPB di Kabupaten Pringsewu.

**Tabel 5. Daftar Informan**

No	Nama Informan	Jabatan	Informasi
1	Harzon, SP.	Pengawas Alsinta Ahli Muda (Koordinator program KPB)	Pelaksanaan Kartu Petani Berjaya di tingkat Kabupateen Pringsewu
2	Muhammad Rinaldo, A.Md.P	Staf Prasarana dan Sarana Pertanian (Admin KPB Center)	Bentuk pelayanan kepada pengguna Kartu Petani Berjaya
3	Hengki Ferdiawan S.T.	Analisis Alat dan Mesin Pertanian	Bentuk pengawasan terhadap birokrasi tingkat bawah
4	Teguh Susanto SP.	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	Proses pelaksanaan sosialisasi Kartu Petani Berjaya di tingkat kecamatan
5	Sujarto	Pemilik Kios Pupuk di Kecamatan Adiluwih	Bentuk kerjasama antara kios dengan pemerintah dan kelompok tani
6	Suroto	Ketua kelompok tani Enggal Jaya (Poktan dengan Kelas Kemampuan Madya)	Dampak positif dan negative yang dirasakan petani dari adanya program Kartu Petani Berjaya
7	Riyanto	Ketua kelompok tani Sukamaju (Poktan dengan Kelas Kemampuan Lanjut)	Dampak positif dan negative yang dirasakan petani dari adanya program Kartu Petani Berjaya

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

Pemilihan informan berdasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan program Kartu Petani Berjaya di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Penentuan informan juga menggunakan teknik *snowball sampling* yakni informan awal yang dipilih dapat merekomendasikan orang lain yang relevan untuk diwawancarai dan membantu peneliti menemukan informan yang signifikan dan mampu memberikan data yang dibutuhkan. Pada pemilihan informan untuk mewakili kelompok tani dipengaruhi oleh beberapa alasan yaitu:

- a) Dipilihnya seorang ketua sebagai representasi dari anggota kelompok tani (Poktan) lainnya.

b) Dipilihnya informan berdasarkan kelas kemampuan kelompok tani. Kelas kemampuan kelompok tani (Poktan) terbagi menjadi 4 yaitu Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya, dan Kelas Utama, berdasarkan aspek penilaian kelompok tani yang dikenal Panca Kemampuan Kelompok Tani (PAKEM POKTAN). Penilaian ini terdiri dari 5 aspek yaitu, kemampuan merencanakan, kemampuan mengorganisasikan, kemampuan melaksanakan kegiatan, kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, serta kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani. Penentuan kelas kemampuan hasil penilaian PAKEM POKTAN adalah sebagai berikut (Kementan, 2018):

1. Kelas Pemula : nilai  $\leq 245$
2. Kelas Lanjut : nilai 246-455
3. Kelas Madya : nilai 456-700
4. Kelas Utama : nilai 701-1000

Poktan di Kecamatan Adiluwih hanya masuk dalam 3 kelas yakni Kelas Pemula, Kelas Lanjut, dan Kelas Madya. Pemilihan informan didasarkan pada kelas poktan yang paling tinggi dan tingkat menengah yaitu Kelas Madya dan Kelas Lanjut. Kelompok tani Enggal Jaya sebagai Poktan Kelas Madya dengan nilai kemampuan 568 dan kelompok tani Sukamaju sebagai Poktan Kelas Lanjut dengan nilai kemampuan 425.

### 3) Studi Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental seseorang (Sugiyono, 2013). Studi dokumen merupakan cara atau teknik mengambil informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dengan objek penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa surat keputusan atau peraturan-peraturan, gambar, dan segala informasi yang berkaitan

dengan implementasi program KPB yang dilakukan di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

**Tabel 6. Data Dokumen Penelitian**

No	Nama Dokumen	Substansi Dokumen
1	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kewajiban Pemerintah Daerah dalam melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani.
2	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya	Dasar hukum pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya di Provinsi Lampung
3	Petunjuk Teknis Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu 2023	Acuan dalam pelaksanaan kegiatan implementasi program Kartu Petani Berjaya di Kabupaten Pringsewu
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 520/24/SK/D.18/2023	Pembagian tim e-KPB tingkat kecamatan se-Kabupaten Pringsewu

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

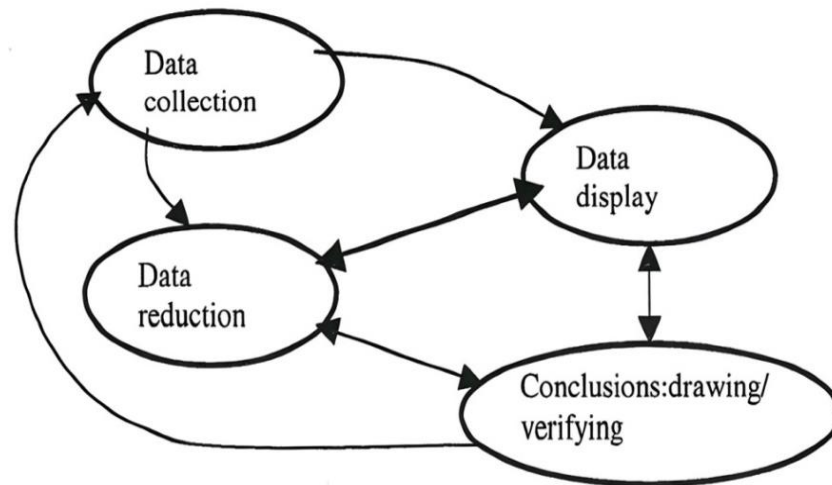
#### 4) Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan (simultan) dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah diperoleh (Sugiyono, 2013). Triangulasi pada penelitian ini terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber merupakan cara mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Sedangkan, triangulasi teknik merupakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2013).

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, yang kemudian menghimpun data kedalam kategori,

menjabarkannya, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, pemilihan hal yang penting untuk dipelajari, dan membuat simpulan, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan dapat menginformasikan temuan kepada orang lain (Hardani dkk, 2020). Sementara, Miles dan Huberman membagi aktivitas analisis data kedalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur ini adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing or verification*) (Hardani dkk, 2020). Tahap-tahap analisis data meliputi:



**Gambar 8. Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)**

Sumber: Sugiyono, (2013)

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data dapat diartikan sebagai merangkum, memusatkan pada hal-hal pokok, memfokuskan ke hal-hal penting, serta mencari tema dan polanya, dengan begitu data yang sudah direduksi akan memunculkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan (Sugiyono, 2013). Data yang telah direduksi dapat mempermudah peneliti dalam proses analisis secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan program Kartu Petani Berjaya (KPB) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu.

## V. KESIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

Program Kartu Petani Berjaya (KPB) di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu menunjukkan implementasi yang belum optimal. Meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), banyak petani menganggap program ini rumit, terutama bagi yang kurang familiar dengan teknologi. Kritik utama datang dari kurangnya kesiapan dan kompetensi SDM, seperti minimnya operator yang mengelola transaksi di setiap desa. Selain itu, koordinasi antara pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Pertanian masih kurang baik, menyebabkan kios pupuk harus melaporkan data melalui dua sistem yang berbeda, yaitu I-Pubers dan KPB, yang meningkatkan beban administrasi. Hasilnya, banyak petani dan pemilik kios merasa program ini belum memberikan solusi konkret terhadap masalah pertanian yang mereka hadapi

Secara keseluruhan, meskipun ada respon positif dari beberapa petani yang melihat kemudahan dalam sistem penebusan pupuk, ketidakpuasan di kalangan petani lain masih cukup besar. Kurangnya regulasi yang kuat dan keterbatasan sosialisasi juga menjadi faktor penghambat. Program ini dapat terhenti sewaktu-waktu tanpa pengawasan yang ketat, yang memunculkan skeptisisme terhadap efektivitasnya. Sebagai upaya perbaikan, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, peningkatan kompetensi SDM, serta penyederhanaan mekanisme penebusan pupuk subsidi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang peneliti ajukan dalam implementasi program Kartu Petani Berjaya di Kecamatan Adiluwih, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Lampung perlu mengagendakan pelatihan dan workshop secara rutin untuk Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) guna meningkatkan etos kerja. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis dan non-teknis, termasuk pengembangan sikap profesional dan etika kerja yang baik.
2. Perbaikan koordinasi antara pemerintah Provinsi Lampung dengan Kementerian Pertanian sangat diperlukan untuk mengintegrasikan algoritma pendistribusian pupuk subsidi untuk mengurangi beban administrasi pada kios pupuk dan memastikan efisiensi dalam pendistribusian pupuk subsidi di Kecamatan Adiluwih.
3. Diharapkan adanya penambahan jumlah sumber daya manusia untuk menjadi operator dalam membantu mengelola transaksi di setiap desa.
4. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) perlu melakukan persiapan yang lebih matang sebelum melakukan sosialisasi, termasuk memahami materi dengan baik, mempersiapkan alat bantu presentasi, dan memastikan informasi yang disampaikan akurat dan relevan.

# **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*.
- Abdul Wahab, Solichin, (2008). *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. (2002), *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Al Muchtar, Suwarma. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Andriyani, R. (2023). Analisis Pendapatan Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan Petani Jagung di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. *digilib unila* , 1-71.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armida Salsiah Alisjahbana, E. M. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di indonesia*.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Budiman, Rusli (2013), *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Bandung: Hakim Publishing.
- Erlansyah, A. (2023). *Petunjuk Teknis Program Kartu Petani Berjaya (KPB)*. Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
- Feraera, A. & Syuryansyah. (2021). *Policy Analysis Of Agricultural Modernization With "Berjaya" Farmer Card In Lampung Province*, 2020. Sawala: Jurnal Administrasi Negara , 1-17.
- Hardani, H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 162.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askara.

- Jufri, A., Syukur, M., & Bakhtiar, B. (2022). Implementasi Kebijakan Penggunaan Kartu Tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. *Phinisi Integration Review*, 5(3), 737-744.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu. (2023). Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 520/24/SK/D.18/2023 Tentang Tim Elektronik Kartu Petani Berjaya (E-KPB) Tingkat Kecamatan Kabupaten Pringsewu. Pringsewu: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu.
- Menteri Pertanian. (2011). Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 72/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Nabila. (2023). *Implementasi Kebijakan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Petani Berjaya*.
- Nugraha, Y., Dedi, A., & S Munir, S. M. (2022). Implementasi Program Kartu Tani di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.
- Nurchayanto, H. (2016). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Kota Semarang. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 57.
- Oko, N. R. (2023). Implementasi Program Pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara (Bang Pesona) pada Kelompok Tani Hutan di Desa Noepesu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Patarai, M. I. (2020). *Kebijakan Publik Daerah (Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan)*. Makassar: De La macca.
- Pemerintah Kabupaten Pringsewu. (2023). *Petunjuk Teknis Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu Tahun 2023*. Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2020). *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020*. Pemerintah Provinsi Lampung.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2013). *Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Lampung: Pemerintah Provinsi Lampung
- PPID Lampung. (2021). *Janji Kerja Arinal-Nuinik "Rakyat Lampung Berjaya"*. Pemerintah Provinsi Lampung.

- Pradita, M. (2017). *Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Padi Di Desa Sumberagung Kecamatan Moyundan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Radar Lampung (2023, Desember 07). Pringsewu Lampung Raih Sembilan Penghargaan Dalam KPB Award 2023. <https://radarlampung.disway.id/>.
- Radio Siaran Pemerintah Daerah (Rapemda). (2023, Desember 06). Kabupaten Pringsewu Borong Penghargaan KPB Award 2023. <https://rapemda.pringsewukab.go.id/>.
- Sekretariat e-KPB. (2023, Mei 31). Program beasiswa kerjasama Pemerintah provinsi Lampung dan Politeknik Negeri Lampung untuk mendukung program kartu petani Berjaya (KPB). <https://www.kpb.lampungprov.go.id/>.
- Sekretariat e-KPB. (2024, April 25). Kerjasama Dinas KPTPH Provinsi Lampung dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi yang berada di Provinsi Lampung. <https://www.kpb.lampungprov.go.id/>.
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., ... & Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Simatupang, E. (2021). Implementasi Kebijakan Program Unggulan Pertanian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Era Pandemi COVID-19. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).
- Sudjana, Nana. 2013. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdaknya Offset.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Tahir, A. (2013). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Gorontalo.
- Taufiqurakhman, B. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Pers.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.

- Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). Implementasi Kebijakan Publik: Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi. Bandar Lampung: Suluh Media.
- Raharjo, J. (2022). Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani di Kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 6(1), 39-57.
- Rika, A. (2023). Analisis Pendapatan Rumah Tangga Dan Tingkat Kesejahteraan Petani Jagung Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
- Riki, R., Abdal, A., & Abdillah, W. S. (2022). Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi DiKecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 121-134.
- Ritter, L. K. (2020). *When attitude matters-A study of the influence of street-level bureaucratic implementation behaviour in the field of conflict-ridden employment policies.*
- Wijayanto, H., & Lestari, O. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani (Studi Kasus Pada Petani Nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalinga Jawa Tengah). *Journal of Political Issues*, 3(2), 98-106.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Yusup Nugraha, A. D. (2022). Implementasi Program Kartu Tani Di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia* , 2900-2912.
- Zainuddin, C. M. (2018). Indikator Kesejahteraan Petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah sebagai Solusi. *Jurnal Ekonomi Islam* , 129-149.